

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan*, Renggang Education, Yogyakarta.
- Chalid, Pheni, 2005, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Forum Pembaharuan Desa, 2007, *Naskah Akademik RUU Desa*, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Halim, Abd., 2014, *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya*, Lembaga Pengkajian dan Pembangunan Bangsa, Yogyakarta.
- Halim, Hamzah, Kemal Renindo Syahrul Saputra. 2009. *Cara Praktek Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai Manual)*. Pranada Media Group, Jakarta.
- H.R. Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Karianga, Hendra, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kartasapoetra, G., R.G. Kartasapoetra, A. Kartasapoetra, 1986, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud M.D., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, M. Laica, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mustaqim, Goris 2010, *Pemuda Membangun Bangsa dari Desa*, Synergia Publishing, Bandung.
- Ndaraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

- N.D, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Desa Assorajang, 2015, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2016-2021*, Pemerintah Desa Assorajang, Assorajang.
- Pemerintah Desa Ongkoe, 2017, *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Desa Ongkoe*, Pemerintah Desa Ongkoe, Ongkoe.
- Pemerintah Desa Ongkoe, 2017, *Profil Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*, Pemerintah Desa Ongkoe, Ongkoe.
- Rivai, Veithzal 2014, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saragi, Tumpal P. 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*, CV Cipiruy, Jakarta.
- Siagian, H., 1983, *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Alumni, Bandung.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Solekhan, Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Suhartono, 2001, *Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sumarjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Swalem, I Gusti Ketut, 1990, *Pembangunan Desa*, Satya Wacana, Semarang.
- Syafruddin, Ateng, 2010, *Republik Desa*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya, H.A.W., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel dan Jurnal.

Akbar, Muh. Firya, Srihandayani Suprpto, Surati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo”, *Publik Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018.

Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 3 Juli 2012.

Rahman, Khairul, “Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”, *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Wedana*, Vol. II Nomor 1 Oktober 2016.

Safriani, Andi, “Hubungan antara Hukum dan Kekuasaan”, *Makalah*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2013.

Tugas Akhir

Agnes Sulistya Wardani, “Implementasi Asas Partisipasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Tinata, Pacitan Jawa Timur”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Ali Fahrudin, Partisipasi “Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Muhammad Faisal, “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Natuna)”, *Tesis*, Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

Internet

Anonim, “Refleksi Tiga Tahun Implementasi Undang-Undang Desa”
<http://setarajambi.org/news/refleksi-tiga-tahun-impelementasi-uu-desa> ,
diakses pada 17 Februari 2019 pukul 15.30

Anonim, “Menengok desa tamansari peraih desa wisata awar dari kemendes”
<https://banyuwangi.merdeka.com/info-banyuwangi/menengok-desa->

[tamansari-peraih-desa-wisata-award-dari-kemendesa-170516z.html](#),
diakses pada 17 Februari 2019 pukul 15.55

Anonim, “Desa ponggok dari desa tertinggal menjadi desa mandiri”
<https://www.kompasiana.com/alangilalang/5876aaa6c322bdd70f823a48/desa-ponggok-dari-desa-tertinggal-menjadi-desa-mandiri?page=all>, diakses
pada 17 Februari 2019 pukul 16.13

Meray Hendrik Mezak, 2006, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”,
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=391089&val=8576&title=Jenis,%20Metode%20dan%20Pendekatan%20Dalam%20Penelitian%20Hukum>, diakses pada 5 Maret 2019.